

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Agensi**

Teori agensi disebut juga dengan teori keagenan yang merupakan sebagai kontrak dua pihak yaitu pemegang saham dan manajemen. Dalam melaksanakan operasional, *agent* yang seharusnya melaksanakan operasional untuk menaikkan nilai perusahaan seringkali terjadi konflik antara *agent* dan *principal* yang disebabkan adanya kepentingan yang bertentangan. Konflik antara *agent* dan *principal* di dalam perusahaan terkadang tidak dapat dihindari sehingga dapat menimbulkan agensi problem. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976).

Ada beberapa cara dalam mengurangi konflik agensi dan asimetri informasi yaitu dengan menerapkan tingkat keselarasan laporan keuangan terutama *corporate governance*, karena dengan diterapkannya *corporate governance* yang baik maka manajemen diharapkan dapat menghasilkan informasi yang mampu menyakinkan para investor bahwa mereka telah mendapatkan informasi yang sebenarnya serupa dengan informasi yang dimiliki manajemen. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat mengungkapkan informasi yang terintegritas dan transparan untuk seluruh pemilik modal atau investor.

Perusahaan dapat memberikan informasi yang terkait secara transparan dan akuntabilitas, serta mampu mengungkapkan segala aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan operasi, lingkungan dan sosial. Sehingga dengan cara menerapkan laporan terintegritas atau *integrated reporting*, maka dapat memenuhi salah satu bentuk kebutuhan tersebut. *Integrated reporting* menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih luas dalam catatan keuangannya daripada laporan perusahaan yang tradisional, menggambarkan atau saling keterkaitan dengan penggunaan sumber daya oleh organisasi, dan berhubungan dengan modal seperti keuangan, material, manusia, intelektual, sosial dan alam (IIRC, 2013). Hal tersebut menjadi informasi utama untuk penilaian yang berharga dari model bisnis

dan strategi organisasi jangka panjang, serta untuk memenuhi kebutuhan informasi dari investor dan *stakeholders*.

## **2.2 Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka *Integrated Reporting***

Tingkat Keselarasan laporan tahunan adalah tingkat kecocokan dengan kerangka laporan terintegritas. Keselarasan antara laporan tahunan dan rerangka *integrated reporting* dapat dilihat dari konsep inti *integrated reporting* yaitu untuk menyediakan satu laporan yang seluruhnya mengintegrasikan informasi keuangan perusahaan dan non keuangan. Chariri dan Januarti (2017) mengatakan bahwa *integrated reporting* bertujuan untuk mengatasi keterbatasan pelaporan keuangan konvensional dan *sustainability reporting* dan diyakini mampu menyajikan perspektif bisnis yang lebih komprehensif, efektif, transparan dan terintegrasi dalam satu format laporan.

Pada tanggal 9 Desember 2013, IIRC mengeluarkan kerangka pelaksanaan pelaporan selaras *Integrated Reporting Framework* (IRF). Tujuan dibuat kerangka tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas informasi yang tersedia bagi para pemangku kepentingan. *Integrated reporting* digagas oleh IIRC dan didukung *Global Reporting Initiatives* (GRI) pada Desember 2011 (Simnett & Huggins, 2015). IIRC mendefinisikan pelaporan terpadu sebagai “komunikasi ringkas tentang bagaimana strategi organisasi, tata kelola, kinerja, dan prospek perusahaan yang dapat menghasilkan penciptaan nilai dari waktu ke waktu dalam jangka pendek, menengah, dan panjang”.

*Integrated Reporting* merupakan proses yang menghasilkan komunikasi melalui penciptaan nilai laporan tahunan dari waktu ke waktu (Busco, 2013:7). Menurut Adams (2013), *Integrated reporting* adalah sebuah perubahan paradigma tentang bagaimana organisasi berpikir mengenai model bisnis mereka dan bagaimana mereka menciptakan nilai. Melalui *integrated reporting*, maka suatu laporan keuangan bukan hanya mengutamakan informasi keuangan saja, namun informasi non keuangan juga menjadi pelengkap, dan tentu akan memberi manfaat atau nilai

tambah bagi perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *integrated reporting* merupakan laporan yang menyajikan informasi secara lebih luas tentang konsekuensi dari keputusan serta tindakan organisasi dalam jangka panjang.

Sejarah awal terbentuknya *integrated reporting*, yaitu pada tahun 2014 *Prince of Wales* membuat program bernama *The Prince's Accounting for Sustainability*. *Prince of Wales* melihat adanya keterbatasan dari informasi akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan. *Integrated reporting* menjelaskan tentang modal yang seharusnya digunakan sebagai pedoman oleh organisasi dalam membuat keputusan dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Modal tersebut yaitu *financial* (keuangan), *manufactured capital* (modal manufaktur), *intellectual* (intelektual), *human* (manusia), *social* dan *relationship* (sosial dan hubungan), dan *natural* (alam). Penelitian mengenai tingkat keselarasan laporan dengan *integrated reporting* di Indonesia masih jarang dilakukan karena konsep dari *integrated reporting* sendiri belum mengeluarkan peraturan untuk mewajibkan pengungkapan *integrated reporting* sehingga *integrated reporting* dapat dikatakan sebagai pengungkapan sukarela (Ahmad, 2017).

Adapun prinsip – prinsip *integrated report*, menurut IIRC 2013, Dalam rerangka *integrated reporting* diuraikan bahwa terdapat tujuh prinsip dalam penyusunan *integrated reporting*. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1) Fokus Strategi dan Orientasi Masa Depan

*Integrated reporting* yang disiapkan oleh perusahaan harus berisi wawasan mengenai strategi dan menggambarkan secara jelas bagaimana kaitan strategi dengan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, serta menggambarkan penggunaan dan dampaknya terhadap modal.

2) Konektivitas Informasi

Prinsip ini mengatur bahwa *integrated reporting* harus memberikan gambaran secara holistik mengenai kombinasi, keterkaitan, dan ketergantungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai dari waktu ke waktu.

3) Hubungan dengan *Stakeholder*

Prinsip ini mengharuskan *integrated reporting* untuk memberikan wawasan mengenai sifat dan kualitas hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan utamanya, termasuk bagaimana dan sejauh mana perusahaan memahami, mempertimbangkan dan menanggapi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder* lainnya.

4) Materialitas

Dalam prinsip ini diatur bahwa *integrated reporting* harus mengungkapkan informasi mengenai semua hal yang secara substantif dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai.

5) Konsisten

Prinsip ini mewajibkan *integrated reporting* harus disajikan secara ringkas sehingga menarik bagi para pengguna laporan.

6) Keandalan dan Kelengkapan

Prinsip ini mengatur bahwa *integrated reporting* harus mencakup semua hal yang material baik yang positif maupun negatif dan diungkapkan dengan cara yang benar dan tanpa kesalahan material.

7) Konsistensi dan Keterbandingan

Prinsip terakhir mengatur bahwa semua informasi yang terdapat dalam *integrated reporting* harus disajikan atas dasar yang konsisten dari waktu ke waktu dan dengan cara yang memungkinkan untuk adanya perbandingan dengan perusahaan lainnya.

Kategori Pengungkapan *Integrated Report*, menurut IIRC 2013 elemen – elemen *integrated report* sebagai berikut:

- Gambaran Organisasi dan Lingkungan Eksternal

Elemen ini menjelaskan mengenai apa yang dilakukan perusahaan dan bagaimana kondisi lingkungan perusahaan dalam menjalankan operasi. Indikator dalam elemen ini yaitu batas pelaporan yang menjelaskan ruang lingkup dari pelaporan ini, visi misi perusahaan, tinjauan bisnis, konteks operasi, dan *summary statistic* yang menjelaskan mengenai pencapaian kinerja perusahaan.

- **Tata Kelola Perusahaan**

Elemen ini menjelaskan bagaimana struktur tata kelola perusahaan, dan bagaimana tata kelola perusahaan mendukung kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai perusahaan. Indikator dalam elemen ini yaitu struktur organisasi, keterkaitan tata kelola dengan strategi perusahaan dan dengan variabel lainnya.
- **Risiko dan Peluang**

Elemen ini menjelaskan mengenai peluang terjadinya risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan serta bagaimana perusahaan mengelolanya. Dengan menganalisis risiko dan peluang, maka perusahaan dapat menggali potensi perusahaan untuk mengambil keuntungan serta menentukan strategi untuk meminimalkan risiko perusahaan. Dengan mengungkapkan risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan, maka perusahaan akan lebih mengetahui dan memahami risiko itu sendiri serta bagaimana langkah manajemen risiko yang akan dilakukan oleh perusahaan. *Integrated report* mengidentifikasi risiko dan peluang yang spesifik bagi organisasi, termasuk hal-hal yang berpengaruh terhadap organisasi, dan kelangsungan usaha (IIRC, 2013).
- **Strategi dan Alokasi Sumber Daya**

Elemen ini menjelaskan mengenai strategi pencapaian tujuan yang disesuaikan dengan sumber daya perusahaan. Strategi dimaksudkan untuk pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang besar. Sebagai tambahan, strategi mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang organisasi, oleh karena itu, berorientasi masa depan.
- **Model Bisnis**

Elemen ini menjelaskan tentang input, proses, output, dan outcome dalam menciptakan nilai perusahaan. Indikator dalam elemen ini yaitu *business model descriptions* yang menjelaskan tentang bisnis model yang dimiliki perusahaan, *links between business model and other* yang menjelaskan tentang keterkaitan model bisnis dengan elemen-elemen lain yang dimiliki

perusahaan, serta *stakeholders dependencies* yang menjelaskan ketergantungan bisnis model dengan pemangku kepentingan.

- **Kinerja dan Hasil**

Elemen ini menjelaskan sejauh mana perusahaan mencapai tujuan strategis untuk periode bersangkutan dan apakah hasil tersebut dapat mempengaruhi modal. Indikator dalam elemen ini terdiri dari hubungan pemangku kepentingan, kinerja masa lalu saat ini dan masa depan, implikasi keuangan dari modal lain, kinerja rantai pasokan, dan kualitas indikator kuantitatif.

- **Prospek Masa Depan**

Elemen ini berisi mengenai apa saja tantangan dan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam mencapai strateginya dan menjelaskan apa implikasinya untuk model bisnis dan kinerja perusahaan di masa depan. Indikator dalam elemen ini terdiri dari *anticipated changes, potential implication, dan estimates*.

- **Elemen Lainnya**

Elemen terakhir berisi penjelasan mengenai bagaimana perusahaan menentukan hal-hal penting yang harus diungkapkan dalam *Integrated Report* dan bagaimana hal-hal tersebut diukur atau dievaluasi. Dimensi dalam elemen ini terdiri dari keringkasan dan keterkaitan, proses penentuan materialitas.

## **2.3 Corporate Governance (CG)**

### **a) Pengertian Corporate Governance (CG)**

*Corporate Governance (CG)* mendefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan untuk memenuhi tujuan bisnisnya dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 2016:2). *Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI)* menjelaskan *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan

kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Pemahaman atas *good corporate governance* adalah untuk menciptakan kredibilitas manajemen baik pada perusahaan bisnis manufaktur maupun perusahaan jasa serta lembaga pelayanan publik pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *corporate governance* adalah suatu sistem yang dirancang dan dijalankan oleh perusahaan untuk memenuhi kepentingan jangka panjang dari pihak – pihak yang berkepentingan, salah satunya yaitu pemegang saham.

Istilah *Corporate Governance* (CG) selama beberapa dasawarsa terakhir menjadi topik yang cukup populer untuk dibahas. CG mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Apabila kondisi GCG dapat dicapai maka diharapkan terwujudnya negara yang bersih dan terbentuknya masyarakat sipil serta tata kelola perusahaan yang baik (Effendi, 2016:144). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **b) Prinsip – prinsip *Corporate Governance***

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG) pada tahun 2011, setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) ditetapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip GCG biasa dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (resposibilitas), *Independency* (independensi), dan *Firness* (kesetaraan). Adapun penjelasan dari masing – masing prinsip *corporate governance* sebagai berikut:

- **Prinsip Transparansi**

Adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.

- **Prinsip Akuntabilitas**

Mengatur peran tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.

- **Prinsip Responsibilitas**

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang – undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik.

- **Prinsip Independensi**

Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip GCG.

- **Prinsip Kesetaraan**

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama juga, sesuai ketentuan yang berlaku.

**c) Tujuan *Corporate Governance***

Tujuan penerapan GCG terhadap perusahaan menurut Surya (2006:8) sebagai berikut:

- Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
- Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
- Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
- Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
- Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.



## **2.4 Struktur *Corporate Governance***

### **2.4.1 Dewan Komisaris Independen**

Dewan Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya & Yustiavanda, 2006:135). Pengertian komisaris independen berasal dari dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Peraturan yang dibuat oleh BEJ mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki sekurang – kurangnya 30% dari dewan komisaris yang ada. (Surya & Yustiavanda, 2006:135).

Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing – masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara (KNKG, 2011). Menurut UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2011).

Menurut Fitria (2017) dewan komisaris independen berperan dalam menyeimbangkan pengambilan keputusan dewan komisaris. Didalam perusahaan GCG melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawas dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif bagi perusahaan. Selain itu dewan komisaris juga memiliki kewajiban dalam mengawasi kinerja dewan direksi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dari dewan direksi. Komisaris independen dalam tata kelola perusahaan dapat memberikan tekanan perusahaan untuk mengungkapkan laporan terintegritas yang lebih luas dalam mewujudkan prinsip GCG.

#### **2.4.2 Komite Audit**

Komite Audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan tugasnya membantu serta memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan (Effendi, 2016:48). Komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Anggota komite audit dapat berasal dari kalangan luar yang berpengalaman, ahli, dan kualitas lainnya yang dibutuhkan. Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Surya & Yustiavanda, 2006:146).

Komite audit mempunyai tanggung jawab utama dalam membantu dewan komisaris untuk menjalankan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan masalah kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal serta proses pelaporan keuangan. Dalam memenuhi tanggung jawabnya komite audit memberikan pengawasan secara menyeluruh memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris, serta mempertahankan independensi yang dimana komite audit harus beranggotakan komisaris independen dan juga pihak luar perusahaan yang tidak ambil alih dalam kegiatan manajemen sehari-hari.

Ukuran komite audit dijelaskan dalam keputusan Direksi BEJ nomor: KEP-399/BEJ/07-2001 Peraturan Pencatatan Efek No. I-A Huruf C, yaitu keanggotaan komite audit sekurang – kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak *ekstern* yang independen dimana sekurang – kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi atau keuangan.

Komite audit sendiri secara umum berfungsi untuk memberi pandangan mengenai masalah apa saja yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi, keuangan dan pengendalian internal. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan perusahaan yang baik, Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan untuk perusahaan yang tercatat wajib memiliki komisaris independen dan komite audit (Setiawan, 2013). Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen yang lebih efektif dan efisien serta mendorong peningkatan pengungkapan informasi secara menyeluruh kepada pemangku kepentingan. Maka manajemen perusahaan tersebut tentunya dapat mendukung dalam mempublikasikan *Integrated Reporting* (IR).

#### **2.4.3 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan Manajerial adalah sebuah prosedur penting untuk meluruskan insentif manajer dengan para pemegang saham (Rahmawati, 2012:103). Menurut Jensen & Meckling (1976), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi prosedur untuk mengurangi problem keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan – kepentingan manajer dengan pemegang saham. Kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal sanggup disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar, sehingga manajer tidak akan memanipulasi keuntungan untuk kepentingannya. Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham, sehingga dengan keterlibatan ini kedudukan manajer sejajar dengan pemegang saham. Manajer diperlakukan bukan semata sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlakukan sebagai pemegang saham, oleh

karena itu diharapkan adanya keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat efektif untuk meningkatkan kinerja manajer. Situasi tersebut akan berbeda jika kondisi manajer sekaligus sebagai pemegang saham, sehingga secara teoritis ketika kepemilikan manajerial rendah maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Adanya kepemilikan manajerial dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jensen & Meckling, 1976:2). Dengan demikian manajer akan bertindak secara hati – hati dalam mengambil keputusan karena akan menanggung hasil keputusan yang diambil.

Kepemilikan Manajerial merupakan persentase besarnya jumlah kepemilikan saham oleh manajemen dalam suatu perusahaan (Kusumawardhani, 2012). Kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (manajer dan dewan direksi). Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial bertujuan untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham yang dapat mengurangi konflik keagenan. Menurut Pujiati (2015) kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan.

#### **2.4.4 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan Institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan persentase (Nabela, 2012:2). Variabel kepemilikan institusional diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki institusi lain diluar perusahaan minimal 10% terhadap total saham perusahaan. Menurut Nuraina (2012) kepemilikan institusional adalah persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan lain yang diukur dengan persentase yang dihitung pada akhir tahun. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi

mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi yang cukup besar dalam pasar modal. Kepemilikan institusional dapat mengurangi biaya keagenan dengan cara mengaktifkan pengawasan melalui investor – investor institusional. Namun hal tersebut terjadi karena dengan keterlibatan institusional dalam kepemilikan saham, maka manajemen perusahaan akan diawasi oleh investor – investor institusional sehingga kinerja manajemen juga akan meningkat.

Menurut Novaridha (2017) menyatakan bahwa pihak institusi biasanya menguasai mayoritas saham dalam perusahaan, dengan adanya kepemilikan institusional yang besar dalam perusahaan maka akan meningkatkan kemakmuran bagi pemegang saham atau investor lainnya. Tingkat kepemilikan saham pihak institusi yang tinggi dalam perusahaan memungkinkan adanya pengawasan yang tinggi dari pihak institusi kepada manajer untuk menghindari perilaku yang merugikan perusahaan akibat ulah manajer. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional adalah salah satu mekanisme dalam *corporate governance* yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas keputusan investasi dalam pelaporan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini akan dijadikan bahan acuan agar dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Rincian mengenai penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Qashash (2019)	Pengaruh Elemen-Elemen <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Integrated Reporting</i> .	Variabel Dependen: <i>Integrated Reporting</i>  Variabel Independen: Elemen-Elemen <i>Good Corporate Governance</i>	Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial hanya dewan direksi yang berpengaruh positif terhadap <i>integrated reporting</i> , sedangkan kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>integrated reporting</i> .
2	Prawesti (2018)	Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Komite Audit terhadap <i>Integrated Reporting</i> .	Variabel Dependen: <i>Integrated Reporting</i>  Variabel Independen: Umur perusahaan, profitabilitas, dan komite audit.	Hasil ini menunjukkan bahwa usia perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan terintegrasi karena semakin lama perusahaan beroperasi, semakin besar asimetri informasi itu terjadi di dalam perusahaan, sehingga perusahaan akan mengungkapkan informasi pada salah satu Komite pelaporan, profitabilitas, dan audit terintegrasi tidak berpengaruh pelaporan

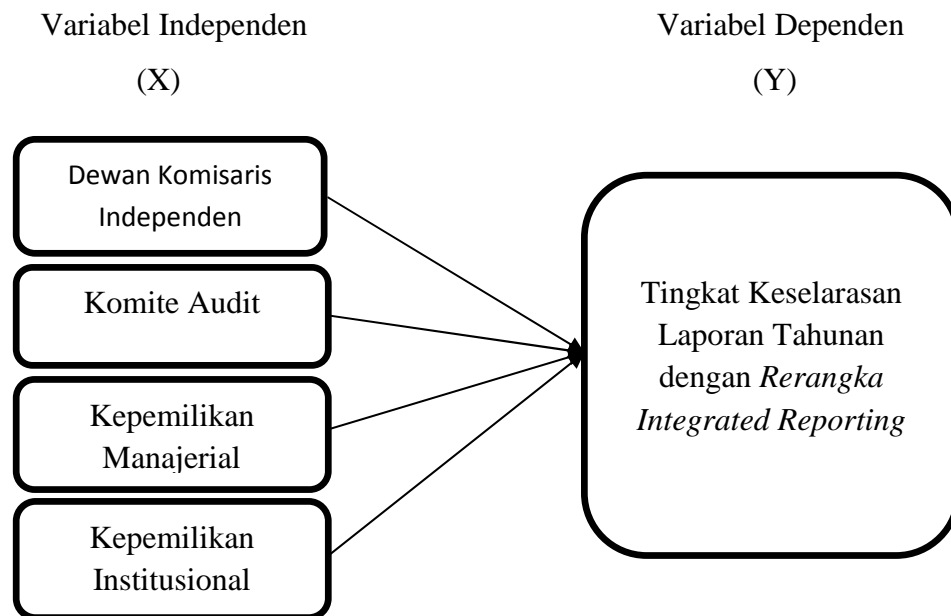
				terintegrasi.
3	Ningsih (2017)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Struktur Kepemilikan terhadap Integrated Reporting.	Variabel Dependen: Integrated Reporting  Variabel Independen: Ukuran perusahaan, leverage, dan struktur kepemilikan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki efek positif pada integrasi pelaporan, leverage tidak berpengaruh pada pelaporan terintegrasi, dan kepemilikan struktur yang diproksi dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional pelaporan terintegrasi yang terpengaruh negatif.
4	Novaridha (2017)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Elemen-elemen Integrated Reporting.	Variabel Dependen: Elemen-elemen Integrated Reporting  Variabel Independen: Kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas.	Hasil penelitian ini menunjukkan mereka yang independen variabel kepemilikan institusional, ukuran dan profitabilitas tidak mempengaruhi elemen pelaporan terintegrasi dalam laporan tahunan perusahaan non-keuangan.
5	Ahmad (2017)	Pengaruh Komite Audit, Ukuran	Variabel Dependen:	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

		Perusahaan, Ukuran KAP terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka Integrated Reporting.	Tingkat keselarasan laporan tahunan dengan rerangka Integrated Reporting  Variabel Independen: Komite audit, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP.	Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka Integrated Reporting.
6	Fiarti (2016)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Luas Lingkup <i>Integrated Reporting</i>	Variabel Dependen: Luas lingkup <i>Integrated Reporting</i>  Variabel Independen: Karakteristik komite audit.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi komite audit dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas lingkup <i>integrated reporting</i> . Sedangkan variabel independensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap luas lingkup <i>integrated reporting</i> .



## 2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.6**

## 2.7 Bangunan Hipotesis

### 2.7.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan *Rerangka Integrated Reporting*

Dewan Komisaris Independen adalah keberadaan sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya, seperti investor (Effendi, 2016:42). Dewan komisaris independen berperan dalam menyeimbangkan pengambilan keputusan dewan komisaris (Fitria, 2017). Didalam perusahaan GCG melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawas dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif bagi perusahaan.

Selain itu dewan komisaris juga memiliki kewajiban dalam mengawasi kinerja dewan direksi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dari dewan direksi. Semakin besar dewan komisaris independen dalam struktur dewan diharapkan dapat

mendorong untuk mengungkapkan pelaporan perusahaan, termasuk pelaporan terintegrasi. Komisaris independen dalam tata kelola perusahaan dapat memberikan tekanan perusahaan untuk mengungkapkan pelaporan terintegrasi yang lebih luas untuk mewujudkan prinsip GCG yaitu responsibility. Berdasarkan penelitian Ahmad (2017) bahwa dewan komisaris independen secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap tingkat keselarasan laporan tahunan dengan *rerangka integrated reporting*, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan *Rerangka Integrated Reporting*.

### **2.7.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan *Rerangka Integrated Reporting***

Komite Audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan tugasnya membantu serta memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan (Effendi, 2016:48). Dalam memenuhi tanggung jawabnya komite audit memberikan pengawasan secara menyeluruh memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris, serta mempertahankan independensi yang dimana komite audit harus beranggotakan komisaris independen dan juga pihak luar perusahaan yang tidak ambil alih dalam kegiatan manajemen sehari-hari.

Komite audit yang efektif dapat meningkatkan pengendalian internal untuk meningkatkan pengungkapan informasi, semakin tinggi atau luas peran komite audit menyebabkan akan luas pengungkapan informasi (Silaban, 2015). Hal tersebut tentunya dapat mendukung perusahaan dalam mempublikasikan *integrated reporting*. Tujuan *integrated reporting* ialah menciptakan nilai bagi perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Hal tersebut sesuai dengan tujuan GCG. Berdasarkan hasil penelitian Fiarti (2016) menunjukkan bahwa komite audit

berpengaruh terhadap *integrated reporting*, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Komite Audit berpengaruh terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan *Rerangka Integrated Reporting*.

### **2.7.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan *Rerangka Integrated Reporting***

Kepemilikan Manajerial adalah sebuah prosedur penting untuk meluruskan insentif manajer dengan para pemegang saham (Rahmawati, 2012:103). Menurut Nurrahman & Sudarno (2013) kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen, perusahaan yang didalamnya ada kepemilikan manajerial, maka pengukuran akan lebih banyak memberikan informasi kepada publik agar perusahaan mendapat legitimasi publik.

Semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajemen dalam perusahaan, manajemen akan berlaku sewenang-wenang dan konflik keagenan menjadi semakin besar. Kepemilikan manajerial yang besar dapat mengarahkan manajer untuk semakin produktif dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan akan lebih rendah (Nurrahman & Sudarno, 2013). Hal tersebut juga berdampak pada lebih banyaknya pengungkapan informasi kepada pemangku kepentingan baik informasi ekonomi, lingkungan, maupun sosial termasuk *integrated reporting*. Berdasarkan hasil penelitian Ningsih (2017) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *integrated reporting*, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan *Rerangka Integrated Reporting*.

#### **2.7.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan *Rerangka Integrated Reporting***

Kepemilikan Institusional merupakan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga perusahaan asuransi, dana pensiunan, atau perusahaan lain (Nuraina, 2012:116). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.

Menurut Novaridha (2017) pihak institusi biasanya menguasai mayoritas saham dalam perusahaan, dengan adanya kepemilikan institusional yang besar dalam perusahaan maka akan meningkatkan kemakmuran bagi pemegang saham atau investor lainnya. Kepemilikan Institusional adalah salah satu mekanisme dalam *corporate governance* yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas keputusan investasi dalam pelaporan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Berdasarkan penelitian Novaridha (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *integrated reporting*, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan *Rerangka Integrated Reporting*.